

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penulisan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula pendapatan yang masuk pada sektor pajak. Karena sumber terbesar di Indonesia berasal dari sektor pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dibidang perpajakan. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, membayar dan melapokan sendiri pajak yang terutang (*selfassessment*), sehingga melalui sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak.

Pajak penghasilan terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 ini merupakan pajak penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri selain yang diatur dalam Undang-Undang PPh 21. Perusahaan sebagai pemberi kerja terhadap karyawan wajib untuk melakukan pemotongan pajak terhadap karyawannya, baik yang merupakan karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap sesuai dengan Undang-Undang pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang No 36 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan. Dalam melakukan pemotongan atas pajak penghasilan yang diterima oleh karyawan tetap, perusahaan sebagai pemotong harus memperhatikan perhitungan penghasilan kena pajak neto karyawan periode tahun 2015 yang dipotong. Penghasilan kena pajak yang dihasilkan sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 sebagai acuan perusahaan untuk menentukan tarif yang berbeda antara karyawan tidak tetap

yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan karyawan yang tidak memiliki NPWP.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PPh pasal 21 yang dipotong dari karyawan tersebut, maka perusahaan sebagai pemotong harus menerapkan prosedur perhitungan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, penetapan tarif yang berbeda atas karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP Pemberi kerja juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

PT.Mega Finance adalah salah satu perusahaan pembiayaan sepeda motoryang berkembang pesat, didirikan pada 24 September 2007. Dengan jumlah karyawan saat ini sekitar 8000 orang, PT Mega Finance fokus menangani pembiayaan sepeda motor Honda. Dan berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengangkat judul : **“Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Pada PT. Mega Finance Cabang Muara Enim”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan data berupa hasil Pajak Penghasilan Pasal 21 dari seorang karyawan pada tahun 2015 dan 2016, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan yaitu:

1. Terdapat perbedaan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada seorang karyawan pada tahun 2015 dan 2016.
2. Dampak perubahan peraturan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2016 terhadap pajak karyawan PT. Mega Finance Cabang Muara.

Dari alternatif permasalahan diatas maka penulis mengambil pokok permasalahan yaitu perbedaan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada tahun 2015 dan 2016.

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar penulisan laporan ini tidak terlalu luas, maka penulis membatasi permasalahan dalam laporan ini. Penulis hanya membahas masalah tentang Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pajak Penghasilan Pasal 21 Data Karyawan Pada PT. Mega Finance Cabang Muara Enim.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui pengaruh perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atas Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang terhadap jumlah penghasilan yang diterima oleh orang pribadi pegawai kantor PT. Mega Finance Cabang Muara Enim.

1.4.2. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis, terutama mengenai pelaporan pajak penghasilan pasal 21 serta dapat menambah wawasan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

2. Bagi Rekan Mahasiswa

Diharapkan hasil laporan akhir ini dapat bermanfaat sebagai bahanmasukan bagi laporan akhir selanjutnya.

3. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberikan saran dan masukan yang membangun untuk perusahaan serta informasi terbaru mengenai Perubahan

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pajak Penghasilan Pasal 21
Data Karyawan Pada PT. Mega Finance Cabang Muara Enim.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam menyusun laporan akhir ini dibutuhkan data yang akurat, objektif serta mendukung untuk menyelesaikan masalah yang ada pada perusahaan. Menurut Sanusi (2013 : 105) metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Cara Survei

Cara survey merupakan cara pengumpulan data di mana peneliti atau pengumpul data mengajukan pertanyaan atau pernyataan kepada responden baik dalam bentuk lisan maupun secara tertulis.

Berkaitan dengan itu, cara survei dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya telepon.

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi daftar pertanyaan yang sudah disusun secara cermat terlebih dahulu kepada responden untuk dijawabnya.

2. Cara Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku terhadap subjek (orang), objek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

3. Cara Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Data seperti: laporan keuangan, rekapitulasi personalia, struktur organisasi, peraturan-peraturan, data produksi, surat wasiat, riwayat hidup, riwayat perusahaan, dan sebagainya.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar laporan akhir ini terdiri dari bab yang isinya mencerminkan susunan materi yang akan dibahas. Tiap bab memiliki hubungan langsung antara satu dengan lainnya. Berikut ini akan diuraikan mengenai sistematika laporan akhir secara garis besar mengenai masing-masing bab guna memberikan gambaran yang jelas mengenai penulisan laporan akhir ini, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul, permasalahan yang ada pada perusahaan, tujuan dan manfaat penulisan, ruang lingkup permasalahan dan metode pengumpulan data serta sistematika penulisan laporan akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan teori-teori yang berhubungan dan menopang penulis dalam membuat laporan. Teori-teori yang digunakan sebagai bahan acuan dalam pembuatan laporan ini antara lain pengertian pajak dan fungsi pajak, jenis pajak dan manfaat pajak, pengertian pajak penghasilan pasal 21, tarif pajak penghasilan, penghasilan tidak kena pajak, format umum perhitungan pajak penghasilan pasal 21 .

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini akan diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan antara lain sejarah singkat perusahaan, visi, misi, struktur organisasi, serta pembagian tugas dan wewenang.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang perhitungan pph pasal 21 yang dilakukan perusahaan, perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan laporan akhir. Bab ini berisikan simpulan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan dan hasil evaluasi terhadap data dari bab sebelumnya serta saran-saran yang membangun guna perkembangan perusahaan.